

## PENDUDUK KOTA, WARGA KOTA, DAN SEJARAH KOTA: KISAH MAKASSAR

Dias Pradadimara  
(Draft Pertama, Juli 2004)

### Abstract

Writing urban history allows us the rare opportunity to examine the interconnections between social and spatial dynamics. The colonial context within which most urban areas in Indonesia developed complicates these socio-spatial “dialectics.” This paper is an early attempt to look at the ways in which Makassar, the largest colonial city in the eastern part of what is now Indonesia, has evolved throughout the 20<sup>th</sup> century. By examining the city’s demographic changes we can see the contest over control of urban space has been fought. What emerges from this contest is a deep sense of ambiguity between strong senses of ethnic identities on the one hand and the urge to become more (and once again) cosmopolitan on the other.

Meski belum sepenuhnya disadari, salah satu hal yang terpenting baik secara teoretik maupun secara historiografik dari berkembangnya penulisan sejarah kota adalah masuknya elemen “ruang” dalam analisa dan perenungan kita akan perubahan atau bahkan transformasi sebuah masyarakat. Pengamatan sepintas terhadap bentuk-bentuk kota di pelbagai belahan dunia menunjukkan kota sebagai daerah yang ditandai dengan tembok yang mengelilingi sebuah ruang dan pintu-pintu gerbang yang mengatur dan membatasi keluar masuknya siapapun. Ini berarti kota, tidak seperti kebanyakan desa, memiliki ruang yang secara khusus dibatasi dan penggunaan ruang di dalamnya yang secara sengaja diatur. Satu elemen yang muncul dari berbagai batasan mengenai kota, menurut Max Weber,<sup>1</sup> adalah adanya kumpulan tempat tinggal yang terpisah namun dalam satu permukiman yang tertutup. Di dalam ruang yang tertutup inilah, lanjutnya lagi, tercampur aspek kekuasaan bersenjata/ militeristik sebuah kota (karena sejatinya kota adalah juga benteng) dan aspek pasar dimana berbagai komoditas dipertukarkan.

Secara teoretik, kota dan pembahasan tentang sejarah kota seharusnya menyadarkan kita bahwa ruang (dalam hal ini ruang kota) bukanlah sesuatu yang alamiah yang ada begitu saja secara kebetulan atau yang diatur oleh *invisible hands* yang tak memihak. Ruang kota memiliki sejarah dengan proses pembentukannya yang dapat dilacak dan dianalisa secara jelas.

Dalam hal ini kita dapat melangkah lebih jauh dari apa yang sudah disarankan oleh Kuntowijoyo dalam bukunya *Metodologi Sejarah* yang kerap menjadi pegangan bagi mahasiswa sejarah tingkat pemula. Dengan sensitifitasnya yang khas akan fenomena sosial dan peranan ilmu sosial dalam penulisan sejarah, beliau menekankan 5 bidang garapan sejarah kota, yakni ekologi kota, transformasi *sosial*-ekonomi, sistem *sosial*, problema *sosial*, dan mobilitas *sosial*.<sup>2</sup> Secara jitu, Kuntowijoyo menunjuk pada aspek sosial dari transformasi kota sebagai aspek sentral dalam penulisan sejarah kota. Dengan melihat aspek sosial ini, kita dapat lebih mudah memahami bahwa kota bukanlah sebuah entitas alamiah (yang terjadi tanpa intervensi

---

<sup>1</sup> *The City.*, New York: The Free Press, 1958

<sup>2</sup> *Metodologi Sejarah.*, cetakan I, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994, hal. 55-62, cetak miring dari saya.

manusiawi) melainkan sebuah entitas sosial (yang sarat dengan dinamika lembaga maupun relasi sosial).

Satu aspek yang tidak kurang pentingnya dari aspek sosial yang belum dikemukakan oleh Kuntowijoyo adalah aspek spasial (keruangan). Kenyataan bahwa kota, lebih dari desa, adalah sebuah ruang yang dibatasi dan diregulasi adalah satu aspek yang harus dipertimbangkan dalam memahami perubahan masyarakat kota. Namun ruang kota bukan hanya “lokasi” bagi terjadinya perubahan sosial (seperti yang cenderung ditekankan oleh Weber). Dalam pelacakan sejarah ruang kota ini kita dapat (dan harus) melihat bagaimana ruang kota diproduksi dan direproduksi dari masa ke masa. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana hubungan antara proses produksi ruang kota ini dengan proses produksi masyarakat kota? Apakah proses produksi ruang kota bersifat otonom dan terlepas dari dinamika masyarakatnya? Atau sebaliknya, terdapat tarik menarik yang erat di antara kedua proses tersebut?

Kesulitan untuk mempertimbangkan aspek (ke-)ruang(-an) dalam menganalisa sejarah kota muncul karena ruang sering dianggap sebagai sesuatu entitas “obyektif” (seperti selembar kertas kosong) yang begitu saja ada secara alamiah dan “siap” untuk diisi apa saja. Untuk membedakan dengan pemahaman ruang secara “obyektif” seperti ini Henri Lefebvre menggunakan istilah “alam kedua” (*second nature*) dimana kondisi obyektif ruang telah ditransformasikan dan dimaknakan secara sosial dan historis.<sup>3</sup> Tempat-tempat suci (seperti ruang masjid, altar dan sejenisnya) dan tempat politis (seperti ruang tidur raja, batu/ tempat pelantikan, dan lainnya) adalah contoh ekstrim ruang-ruang “obyektif” yang sudah berubah secara sosial dan historis menjadi “alam kedua.” Namun lebih lanjut, Lefebvre menekankan bahwa seluruh muka bumi ini sudah dipenuhi dengan ruang yang memiliki makna dimana maknanya dibentuk dari proses sosial yang berubah dari masa ke masa. Di luar ruang-ruang “luar biasa” seperti kedua contoh di atas, terdapat juga ruang-ruang “biasa” dalam kehidupan sehari-hari di kota (seperti pabrik, perumahan, daerah “lampu merah,” terminal, dan sebagainya). Ruang-ruang ini bukan hanya mencerminkan adanya status sosial yang berbeda, namun lebih dari itu, merupakan penentu bentuk relasi sosial antar lokasi.

Lefebvre sering dikritik karena terlalu jauh menganggap bahwa proses produksi ruang kota memiliki dinamikanya sendiri yang tidak hanya terpisah dari dinamika proses pembentukan kelompok sosial dan relasi sosial tapi juga mempengaruhi proses tersebut. Dia dianggap melakukan pemujaan berlebihan akan pentingnya ruang dalam analisisnya (*fetishism of space*). Para pengkritiknya seperti David Harvey dan Manuel Castell (yang adalah muridnya), mencoba lebih menekankan pada adanya dialektika antara proses spasial dengan proses sosial, antara ruang dan masyarakat. Ruang, seperti juga masyarakat, memiliki sejarah, dan sejarahnya dibentuk dalam dialektikanya dengan masyarakatnya.<sup>4</sup> Secara lebih jelas, pemahaman yang menekankan akan adanya dialektika proses produksi ruang dengan proses produksi sosial ini disebut oleh Mark Gottdiener sebagai *the social production of urban space* yang memiliki 4 karakteristik.<sup>5</sup>

Pertama, relasi spasial maupun relasi temporal (historis) merupakan aspek yang intrinsik dalam masyarakat. Hubungan antara satu ruang dengan ruang yang lain dari masa ke

---

<sup>3</sup> Lefebvre, Henri, *The Production of Space*. Oxford: Basil Blackwell, 1991

<sup>4</sup> Untuk tinjauan perdebatan dalam mazhab ini, lihat Edward W. Soja, *Postmodern Geographies. The Reassertion of Space in Critical Social Theory*. London: Verso, 1989, terutama bab “Socio-Spatial Dialectics.”

<sup>5</sup> Paragraf di bawah ini diambil dari Gottdiener, M., *The Social Production of Space* (second ed.). Austin: The University of Texas Press, 1994, hal. 195-201

masa merupakan bagian integral dari satu masyarakat. Kedua, fenomena geografis dan demografis merupakan cerminan dari proses tarik menarik dari relasi sosial. Terbentuknya daerah permukiman padat yang “kumuh” ataupun pusat pertokoan tidak terlepas dari adanya perubahan relasi sosial, intervensi modal, dan kekuasaan negara di dalam dan di luar kota. Ketiga, meski bisa dianggap bahwa ada hubungan antara bentuk dan status bagian/ ruang kota dengan moda-moda produksi dalam sistem ekonomi yang kapitalistik yang mewarnai kota, namun hubungan tersebut tidak otomatis ataupun statis. Keempat, proses produksi ruang kota tidak hanya merupakan proses perubahan struktur ruang tetapi juga melibatkan peranan aktor-aktor yang memiliki pilihan untuk mengikuti struktur yang berubah tersebut atau bahkan ikut merubah struktur.

Apabila pentingnya hubungan antara dinamika masyarakat dan dinamika ruang kota sudah dapat menjadi dasar penting dalam melihat sejarah kota, pertanyaan yang pantas diajukan pada saat ini adalah sejauh mana pola perkembangan kota di daerah-daerah bekas koloni (seperti di Indonesia) dapat disamakan dengan perkembangan kota di daerah-daerah yang belum berkembang namun tak pernah dijajah? Dengan kata lain, sejauh mana “kota kolonial” dapat dikelompokkan bersamaan dengan kota-kota di daerah belum berkembang lainnya dan karenanya dianalisa dengan alat analisa teoretik yang sama? Brenda S. A. Yeoh dalam bukunya yang luar biasa tentang sejarah “kota” Singapura, menganggap bahwa kota kolonial adalah satu entitas terpisah yang memiliki 3 karakteristik yang spesifik.<sup>6</sup> Karakteristik pertama adalah adanya masyarakat yang sangat beragam. Dalam hal ini kota kolonial betul-betul menjadi tempat apa yang oleh J. S. Furnivall disebut sebagai masyarakat plural. Namun lebih jauh dari hanya sekedar plural seperti yang dikatakan Furnivall, karakteristik kedua masyarakat kota kolonial adalah bahwa pluralitas itu mengandung di dalamnya sebuah hirarki dengan kelompok ras tertentu di atas, yang lain di tengah, dan yang terbesar, yaitu “pribumi” yang bisa jadi terdiri dari beberapa kelompok etnis berbeda, di bawah. Karakteristik ketiga masyarakat kota kolonial adalah bahwa posisi penguasa yang berada di puncak hirarki secara terus menerus berada di tangan ras kolonialis kulit putih. Kota kolonial yang pada umumnya berada di bawah penguasaan langsung penguasa kolonial mengalami apa yang disebut oleh Mahmood Mamdani sebagai “pemerintahan langsung yang didasarkan pada ras (*racialized direct rule*).”<sup>7</sup> Di dalam konteks inilah kontestasi dan dan negosiasi dalam merebut ruang kota dilakukan. Tulisan di bawah ini adalah usaha awal yang berusaha mengurai konteks di dalam ruang dan masyarakat kota Makassar berubah.

## A. TOPOGRAFI POLITIK KOTA KOLONIAL MAKASSAR

Kota Makassar tumbuh dari kota kolonial yang terbentuk di sekitar benteng Rotterdam mulai akhir abad ke-17. Permukiman-permukiman baru seperti Vlaardinggen dan Kampung Baru tumbuh di sebelah utara dan selatan benteng dan dihuni oleh masyarakat dari berbagai kelompok termasuk Melayu, Cina, Belanda, Bugis, Jawa, dan tentu saja kelompok masyarakat Makassar dari Gowa dan sekitarnya. Di tahun 1930 di kota ini terdapat hampir 3500 penduduk “Eropa,” lebih dari 15.000 “Cina” dan lebih dari 65 ribu “Bumiputera” dari berbagai daerah di Hindia.

---

<sup>6</sup> Yeoh, Brenda S.A., *Contesting Space*. Singapore: Oxford University Press, 2001

<sup>7</sup> Yang dibedakannya dengan “*tribalized indirect rule*” yang di daerah koloni Belanda sering disebut dengan swapraja atau *zelfbestuur*. Lihat Mamdani, *Citizens and Subjects.*, Princeton: Princeton University Press, 1996.

Di dekade-dekade awal abad ke-20 Kota Makassar telah berkembang menjadi kota yang kosmpolitian. Dari para pemasang iklan dalam satu buku petunjuk turis untuk kota Makassar dan untuk daerah Sulawesi Selatan mungkin bisa dibayangkan kondisi kota tersebut di tahun 1938.<sup>8</sup> Inilah sebuah kota kosmopolitan dengan segala fasilitasnya yang telah menjadikan kota ini sebagai bagian dari sebuah jaringan komunikasi dan transportasi yang menghubungkannya dengan segala penjuru dunia. Di Pasarstraat (sekarang Jl. Nusantara) yang selalu sibuk ada setidaknya 3 toko pakaian besar masing-masing “Hotchand Kemchand,” “Bombay Moerah,” dan “Liberty.” Nama-namanya mengindikasikan setidaknya dua dari tiga toko tersebut dimiliki oleh pedagang keturunan India. Sementara tidak jauh dari sana, di Tempelstraat (sekarang Jl. Sulawesi), dalam sebuah gedung indah ada toko pakaian dengan nama dalam bahasa Perancis “Au Bon Marche.” Kalau itu belum cukup, masih ada satu tempat lagi yang juga menyiarkan aksen Perancis, yang meskipun namanya *Maison* “Femina” namun membuka pintunya untuk *dames* maupun *beeren*. Bila kebutuhan pakaian bisa dipenuhi dengan toko-toko di atas, untuk kebutuhan hasil-hasil peternakan bisa dihubungi *boerderij* “Frisia” di Goaweg (sekarang Stadion Matoangin) yang menyediakan susu segar dari sapi Australia maupun sapi dari—seperti juga nama perusahaannya—Frisland di ujung utara Negeri Belanda. Di tempat ini pemiliknya yang nampaknya keturunan Eropa Timur, U. Hudoffsky, juga menyediakan yoghurt Bulgaria “asli,” dan juga mentega.

Bila barang-barang yang dijinjing dari toko-toko sudah terlalu banyak, tersedia beberapa perusahaan taksi yang siap mengantar. Namun tidak sedikit penduduk kota yang lebih memilih untuk membeli sedan Italia, “Fiat,” baik model yang paling irit ataupun yang paling gaya yaitu model 1500 sang “Kereta Ajaib.” Jika tidak, meskipun lebih boros, tersedia pula sedan Amerika “Dodge,” termasuk yang paling besar dan mewah Dodge-Six “De Luxe” dengan 7 tempat duduk. Semua bisa dipesan langsung melalui telepon dengan pedagang mobil H.P Lienhardt, juga di Pasarstraat. Kesan kosmopolitan kota Makassar diperkuat dengan hadirnya 9 konsulat yang mewakili negara-negara Denmark, Swedia, Norwegia, Inggris, Perancis, Jerman, Belgia, Portugal, dan satu negara asia, Cina.

Tumbuhnya permukiman di sekitar Benteng Rotterdam ini seakan menandakan adanya keterputusan historis antara daerah yang kelak menjadi kota Makassar dengan bekas Benteng Somba Opu yang terletak di sebelah selatannya yang pernah menjadi pusat perdagangan di bawah kontrol penguasa Gowa. Permukiman di sekitar Benteng Rotterdam adalah kota baru yang tumbuh dari pelbagai elemen campuran yang menjadi akar kota di kemudian hari. Sedang penduduk “Bumiputera” terus mengalir dan mengisi kota ini dari berbagai daerah di seluruh Hindia, terutama dari bagian timur. Dengan kata lain, kota Makassar adalah kota kolonial yang lahir bersamaan dengan hadirnya sumber kekuasaan baru yang tidak hanya berbeda namun bahkan berhadap-hadapan dan bersaing dengan “kota lama” di sebelah selatannya yang menjadi simbol kekuasaan Gowa yang sudah memudar.<sup>9</sup>

Perluasan dan pembangunan kota Makassar sehingga memiliki bentuk seperti yang didapat di tahun 1938 di atas baru dimulai sekitar 30 tahun sebelumnya. Jika pada akhir abad ke-19 jumlah penduduk kota ini berada pada kisaran 20 ribu-an saja, maka setelah penaklukan penguasa-penguasa lokal di Sulawesi Selatan oleh Pemerintah Hindia di tahun 1905-6 jumlah penduduknya terus berlipat. Di tahun 1905 jumlah penduduk kota ini diperkirakan 26 ribu orang. Dua puluh lima tahun kemudian, menurut hasil sensus tahun

---

<sup>8</sup> *Gids van Makassar en Zuid Celebes.*, Makassar: Celebes Drukkerij, 1939

<sup>9</sup> Sebenarnya pandangan tentang keterputusan historis antara Makassar dengan Gowa—atau dalam hal ini dengan Somba Opu—sudah secara implisit dinyatakan oleh Matulada. Lihat bukunya *Menyusuri Jejak Kehadiran Makassar dalam Sejarah.*, [n.p]: Bhakti Baru-Berita Utama, 1982, hal. 95

1930, penduduknya sudah berlipat lebih dari 3 kali dan mencapai lebih dari 84 ribu orang, dan ini membuat Makassar menjadi kota besar kedua di luar Jawa setelah Palembang. Ada tanda-tanda penduduk kota ini terus bertambah, namun sayang sulit diketahui secara tepat laju pertumbuhannya karena tidak ada lagi penghitungan penduduk yang cukup tepat yang dilakukan hingga nanti setelah tahun 1960.<sup>10</sup>

Kota Makassar di tahun 1930-an sudah dilayani dengan fasilitas kota yang baik. Dalam buku petunjuk untuk turis di tahun 1938, Makassar sudah dibanggakan sebagai “kota yang paling diterangi di Hindia Belanda.” Selain di kotanya sendiri, tenaga listrik juga tersedia di Sungguminasa, dan nantinya, menjelang tahun 1940 juga di semua kota di sekitar Makassar termasuk daerah tamasya Malino. Di masa itu listrik, seperti juga gas, dilayani oleh perusahaan swasta, dan terdapat 4.342 pelanggan listrik di Makassar yang menggunakan 4,7 juta kilowatt jam tenaga listrik.<sup>11</sup> Dan kalau diasumsikan tiap pelanggan menggunakan listriknya untuk rumahnya yang dihuni oleh, katakanlah, 5 orang anggota keluarga, maka 21 ribu lebih penduduk kota (atau hampir seperempat dari keseluruhan penduduk) sudah menikmati aliran listrik. Kemudian, sejak 1924 pemerintah kota sudah menyediakan fasilitas air minum yang memadai. Di Goaweg dibangun satu menara air yang masih berfungsi hingga sekarang. Sumber air bakunya diambil dari sungai Jeneberang dengan menggunakan pompa, sedang pipa transmisi airnya dibuat sepanjang 7 km dari Sungguminasa.<sup>12</sup> Kota Makassar di abad ke-20 adalah kota “baru” yang tumbuh bersamaan dengan semakin meningkatnya perekonomian di kota, di sekitar kota, di daerah-daerah di sebelah timur Sulawesi dan di Hindia secara keseluruhan dan bersamaan dengan melandanya kemoderenan yang melanda daerah-daerah koloni.

Pertumbuhan dan perluasan kota Makassar berlangsung sejajar dengan semakin lengkapnya perangkat birokrasi pemerintah yang mengatur, mendisiplinkan dan menguasai kota. Tiga tahun setelah Decentralisatiewet 1903 diberlakukan oleh Gubernur Jenderal Idenburg dan segera setelah penaklukan penguasa-penguasa lokal selesai dilaksanakan, Makassar menjadi sebuah *gemeente* yang berhak mengatur dan memerintah diri sendiri. Untuk itu dibentuk pula Dewan Kota (*Gemeenteraad*) yang beranggotakan 13 orang yang terdiri dari 8 orang Belanda, 3 pribumi dan 2 timur asing dan diketuai oleh Kepala Pemerintahan Daerah Afdeling Makassar (*Het Hoofd van Plaatselijk Bestuur van de Afdeling Makassar*). Lima tahun kemudian susunan dewan kota diperbesar dengan ditambahkannya 2 orang Belanda. Pada 1916 dewan ini mengusulkan adanya perubahan lebih lanjut terhadap struktur pemerintahan kota ini. Usul ini diterima oleh Gubernur Jenderal, dan di tahun 1918 Makassar memperoleh Walikotanya (*Burgemeester*) yang pertama. Walikota jugalah yang menjadi ketua dewan kota. Duapuluh tahun kemudian, di tahun 1938 status Makassar berubah lagi menjadi Kotapraja (*Stadsgemeente*) dengan hak-hak pengaturan yang diperluas dan jumlah anggota dewan diperbanyak. Kali ini 2 orang pribumi ditambahkan ke dewan dan menjadikan jumlah total anggotanya 17 orang.<sup>13</sup> Tampak jelas bagaimana ras menjadi satu dasar pertimbangan, kalau bukan malah pertimbangan utama, bagaimana penguasa kolonial mengendalikan kota.

---

<sup>10</sup> Barbara S. Harvey, *Pemberontakan Kahar Muzakkar. Dari Tradisi ke DI/TII.*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1989, hal. 89-91, Sarkawi, “Perkembangan Pendidikan Kolonial di Makassar, 1876-194,” Tesis Universitas Gadjah Mada, 1997, hal. 30-3

<sup>11</sup> Harvey, hal. 66

<sup>12</sup> Yulianto Sumalyo, *Pola Perkembangan Kota dan Arsitektur Ujung Pandang.*, Makassar: Jur. TA Unhas, 2002, hal. 46

<sup>13</sup> *Pedoman Kota Besar Makassar.*, Makassar: Tri Bakti, 1954, hal. 8-9. Perlu dicatat bahwa perbandingan jumlah wakil dari tiap kelompok masyarakat berbanding terbalik dengan jumlah kelompok

Untuk mengendalikan pertumbuhan permukiman di kota, di tahun 1918 dikeluarkan *Bouw en Woonverordening voor de Gemeente* Makassar yang kemudian diperbaiki di tahun 1949 dan 1952, dan sekarang sudah dilupakan sama sekali. Peraturan ini digunakan untuk mengatur bangunan yang akan didirikan dan secara tak langsung melakukan zonasi untuk tempat tinggal dari kelompok yang berbeda. Tahun 1926 juga dikeluarkan *Hinderordonantie* yang digunakan untuk menentukan kegiatan-kegiatan tertentu yang bisa atau tidak bisa dilakukan di kota.<sup>14</sup> Di kota Makassar teknologi kekuasaan kolonial Belanda yang menggunakan ras sebagai dasar kategori pengendalian penduduk kota dan ruang kota ini muncul ke permukaan dengan lahirnya sebuah sistem pemerintahan kota bermuka dua. Di satu sisi sistem pemerintahan ini didasarkan pada sistem “moderen” yang dilengkapi dengan adanya dewan kota yang menjadi perwakilan warga kota (maksudnya terutama warga kota berstatus hukum “Eropa” yang minoritas). Di sisi lain—atau bahkan sisi bawah, hampir di bawah permukaan yang tak akan nampak dalam buku panduan untuk turis—ada sistem pemerintahan yang mengandalkan pada penguasa-penguasa lokal dan juga mata-mata untuk mengawasi mayoritas penduduk yang “bumiputera.”<sup>15</sup>

Kalau di satu sisi pemerintahan “moderen” yang diciptakan mengambil bentuk satu pemerintahan kota yang bekerja dengan sistem perwakilan yang (seharusnya) liberal dan demokratis, maka di sisi lain pemerintahan kota Makassar didasarkan pada sistem pembagian wilayah dimana di setiap wilayah terdapat kepala yang pemilihannya didasarkan pada sistem patron-klien tradisional. Sisi pemerintahan moderen adalah wilayah bagi warga kota “Eropa” sedang sisi pemerintahan tradisional digunakan untuk mengontrol warga kota lainnya yang bukan “Eropa.” Bersamaan dengan diperolehnya status *gemeente*, kota Makassar dibagi pula menjadi 6 distrik masing-masing Makassar, Wajo, Melayu, Ende, Ujung Tanah dan Mariso. Semua wilayah ini, kecuali dua yang terakhir, secara nyata menunjuk pada asal-usul permukiman yang bersifat etnis—setidaknya di masa awalnya.<sup>16</sup> Sejak tahun 1921 hanya 4 distrik tersisa di kota ini dengan dihapuskannya distrik Melayu dan Ende. Setiap distrik dikepalai oleh seorang “*kapitein*” atau “*kapitang*” kecuali Ujung Tanah dan Mariso yang dikepalai oleh seorang “*gallarang*” yang semuanya digaji. Untuk warga kota yang menjadi “perantara” di dua kelompok ras, masih ada kelompok “Cina” yang juga memiliki satu “*major*,” sedang untuk kelompok Timur Asing lainnya juga ditunjuk satu “*kapitein*.” Di setiap distrik terdapat kampung-kampung yang juga diketuai oleh seorang kepala kampung (*matoa kampung* atau *kampung hoofd*) yang dipilih sendiri oleh para laki-laki dewasa di sana dari antara mereka sendiri.

Kalau kelompok Timur Asing adalah jembatan sosial dan ekonomi di antara dua kelompok ras penghuni kota, maka kepala kampung kemudian menjadi semacam jembatan pengawasan dan pengendalian yang menghubungkan antara kedua muka sistem

---

masyarakat yang ada. Meskipun sudah ditambah di tahun 1938, kelompok “bumiputera” yang mayoritas hanya diwakili oleh sejumlah kecil anggota dewan.

<sup>14</sup> McTaggart, W. Donald, “Kebijaksanaan Pembangunan Kota di Indonesia,” *Masyarakat Indonesia*, 3, 1, 1976, hal. 80-1

<sup>15</sup> Untuk peranan mata-mata sebagai alat kontrol, lihat Edward Lambertus Poelinggomang, “Perubahan Politik dan Hubungan Kekuasaan: Makassar 1906-1942.,” Tesis untuk Universitas Indonesia, Jakarta, 1983.

<sup>16</sup> Nama wilayah bisa membuat kita menganggap bahwa penduduk wilayah tersebut selalu berasal dari daerah atau kelompok etnis tertentu. Dan buku *Sejarah Sosial Daerah Sulawesi Selatan. Mobilitas Sosial di Kota Makassar 1900-1950*. (Jakarta: DPdK, 1984/1985) membuat anggapan tersebut (lihat terutama Bab II). Tapi, seperti yang ditunjukkan oleh hasil penelitian Professor Heather Sutherland yang menggunakan data arsip, anggapan semacam itu ternyata salah untuk abad ke-18 dan seterusnya.

pemerintahan kota. Memang benar bahwa kampung, seperti juga desa, adalah sebuah ‘ciptaan’ kolonial.<sup>17</sup> Dia adalah perkembangan dari sebuah permukiman yang bersifat “etnis” (artinya, bisa jadi penduduk satu kampung adalah migran dari daerah yang sama) namun kemudian mengambil bentuk teritorial (memiliki wilayah) yang kemudian diintegrasikan dalam sebuah struktur pembagian wilayah koloni. Kenyataan bahwa kepala kampung dipilih oleh dan dari kalangan para lelaki dewasa di permukiman tersebut memberi ruang kemungkinan bagi terus dimainkannya elemen-elemen kekerabatan (baik kekerabatan sesungguhnya maupun buatan) dan karisma pribadi—keduanya adalah basis bagi sistem patron-klien tradisional—dalam pemilihan kepala kampung. Dengan kata lain, di bawah permukaan sistem pemerintahan kota Makassar yang moderen dibentuk dan dipertahankan sistem kekuasaan lama dengan berbagai elemen tambahan baru yang campur aduk.

Kedua muka sistem pemerintahan kota Makassar ini tidak diubah setelah pendudukan Jepang berakhir, meskipun dengan pemain yang berbeda. Pemerintahan Sipil Hindia Belanda (NICA) membentuk kembali pemerintahan kota. Dan di antara tahun 1945 hingga 1950, kecuali untuk beberapa bulan di tahun 1947, kota ini dipimpin oleh 3 orang Makassar sendiri, masing-masing Baso Daeng Malewa sebagai *Hoofd van Plaatselijke Bestuur* yang kemudian diganti oleh Abdurrajab Daeng Massiki. Selanjutnya dari 1947 hingga 1950 kota Makassar kembali memiliki Walikota dan dipegang oleh Abdul Hamid Daeng Magassing. Melalui pemilihan, dibentuk pola Dewan Kota pada bulan Agustus 1947. Dewan ini beranggotakan 21 orang yang terdiri dari 4 orang dari golongan Belanda, 4 orang dari golongan Cina dan sisanya dari golongan Indonesia—suatu komposisi yang hampir terbalik dengan komposisi di masa sebelum pendudukan Jepang.<sup>18</sup> Meskipun demikian dualisme sistem pemerintahan kota yang lama sulit dihapus karena 3 hal. Pertama, karena berbagai alasan, perubahan belum menyentuh sistem pemerintahan di kampung-kampung. Kedua, sejak tahun 1948, sejalan dengan politik NIT, daerah-daerah di Sulawesi Selatan kecuali kota Makassar mendapat satu sistem pemerintahan yang sedikit banyak meniru sistem pemerintahan tradisional dengan pengakuan atas kedudukan penguasa lama (sebagai “raja” atau istilah semacamnya) serta pembentukan Dewan Hadat di tiap daerah. “Perpanjangan hidup” sistem legitimasi tradisional di masa pasca kemerdekaan ini secara tak langsung seolah membenarkan sistem patron-klien tradisional yang begitu mewarnai kekuasaan di kampung-kampung di kota Makassar dari masa sebelum 1942.

Ketiga, dengan dibentuknya Negara Indonesia Timur (NIT) di tahun 1946 mulai berdatanganlah para politisi dari seluruh daerah ke Makassar yang menjadi ibukota NIT. Akibatnya, seperti yang disimpulkan oleh Harvey, ditetapkannya Makassar menjadi ibukota NIT mengakibatkan 2 hal lain. Yang pertama adalah dipertahankannya ke-kosmopolitan dan ke-multietnis kota dengan datangnya para politisi dari seluruh penjuru Indonesia bagian timur maupun politisi dan wartawan dari Negeri Belanda dan negara-negara lain. Sifat kosmopolitan dan multietnis yang tak jauh berbeda dengan masa sebelum pendudukan Jepang ini seolah mempertajam perbedaan antara kota Makassar dengan daerah pedesaan di Sulawesi Selatan yang umumnya jauh dari sifat kosmpolitan dan dihuni hanya oleh satu, atau paling banyak dua kelompok etnis. Yang kedua, dalam persepsi para anggota laskar yang bergerak di pedesaan, Makassar kemudian menjadi simbol gerakan kolaborasi dengan

---

<sup>17</sup> Kesimpulan Jan Breman yang provokatif ini (lihat Breman, *Village in Java*. Rotterdam: CASP, 1981) dibenarkan untuk Makassar oleh Edward Poelinggomang. Lihat Edward Lambertus Poelinggomang, hal. 145-6

<sup>18</sup> Hanoch Luhukay, *Dari Makassar ke Ujung Pandang.*, manuskrip, hal. 63, 226-7, 269-70

Belanda. Kedua kondisi di atas membuat pengalaman “berjuang” di masa “revolusi” menjadi sangat berbeda bagi mereka yang bergerak di dalam atau di luar kota.

Dengan kata lain, berbagai dinamika yang terjadi di tahun 1940an mengakibatkan dualisme di dalam kota bergeser menjadi dualisme antara kota Makassar *vis-à-vis* daerah pedesaan. Makassar kemudian dianggap sebagai kotanya “boneka” sedang pedesaan adalah daerahnya “patriot.”<sup>19</sup> Yang menjadi “korban” dalam dikotomi sederhana semacam itu adalah mereka yang selama ini aktif dalam NIT dan dikenal sebagai republikan. Tempat, arena, dan cara berpolitik mereka membuat mereka tidak bisa jauh dari citra “boneka.” Pertanyaannya sekarang adalah sejauh mana ke-kosmopolitan maupun ke-multietnis-an kemudian mendapat citra yang buruk pula? Apakah kemudian ke-kosmopolitan dan ke-multietnis-an harus berhadapan dengan kesukuan dan ke-“asli”-an? Sejauh mana kebanggaan akan, misalnya, ke-Bugis-an ataupun ke-Mandar-an seseorang berpengaruh terhadap cita-citanya tentang kota Makassar di masa depan?

## B. PERUBAHAN DEMOGRAFI, PERUBAHAN POLITIK WAJAH KOTA?

Sistem pemerintah kota yang bermula dua tersebut berakhir bersamaan dengan berakhirnya riwayat NIT dan menciptakan satu periode transisi di sepanjang dekade 1950-an. Berakhirnya riwayat NIT tidak berarti berakhir pula masa sulit. Masuknya Kahar Muzakkar ke hutan di tahun 1950 menandakan dimulainya ‘masa gerombolan’ dan mengalirnya pengungsi ke kota Makassar. Jika di tahun 1930 penduduk kota adalah sedikit di atas 84 ribu orang, maka di tahun 1961 penduduk kota sudah menjadi lebih dari 384 ribu.<sup>20</sup> Ini berarti selama 30 tahun Makassar mendapat tambahan 300 ribu jiwa atau tumbuh dengan laju hampir 5% per tahun.<sup>21</sup> Dengan kata lain, dalam rentang waktu tersebut, penduduk kota Makassar berlipat hampir 5 kali.

Dari data lain yang tersedia bisa diperoleh satu kesimpulan awal (yang masih harus diuji) bahwa terdapat dua gelombang migrasi masuk ke kota Makassar dari tahun 1945 hingga tahun 1970. Gelombang migran pertama masuk ke kota di antara tahun 1945 hingga 1950 dari pelbagai daerah di Indonesia Timur sedangkan gelombang migran kedua masuk ke kota dari tahun 1950 hingga akhir tahun 1960-an dan mereka umumnya berasal dari daerah di Sulawesi Selatan sendiri. Arus masuk migran gelombang pertama lebih merupakan refleksi pentingnya posisi sosial politik kota Makassar di daerah Indonesia bagian timur. Sedang para migran gelombang kedua masuk ke kota untuk menghindari ketidak amanan dan ketidak pastian di daerah pedesaan Sulawesi Selatan bersamaan dengan meluasnya operasi militer baik oleh TNI maupun oleh ‘gerombolan.’ Migran gelombang kedua ini berjumlah lebih banyak dari migran gelombang pertama.

Hingga tahun 1950-an masyarakat Makassar, terutama yang berada di tengah kota, masih merupakan masyarakat yang merupakan almagam dari berbagai kelompok etnis. Dari hasil survey yang dilakukan H. T. Chabot di satu pemukiman di tengah kota di tahun 1951-2, diketahui hanya 35% warga setempat lahir di kota Makassar, 31% penduduk lahir di daerah

---

<sup>19</sup> Barbara S. Harvey, “Sulawesi Selatan: Boneka dan Patriot,” hal. 229 dalam Audrey R. Kahin, *Pergolakan Di Daerah pada Awal Kemerdekaan.*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1985

<sup>20</sup> *Sensus Penduduk 1961. Penduduk Desa Sulawesi dan Maluku.* Yogyakarta: PPSK-UGM dan BPS, 1981

<sup>21</sup> Ini tidak berarti bahwa selama 30 tahun laju pertumbuhan penduduk kota per tahun konstan pada angka tersebut. Tidak adanya data penduduk di tahun 1940-an dan 1950-an menyulitkan dipastikannya perbedaan laju pertumbuhan penduduk dari dekade satu ke dekade yang lain.

Indonesia bagian timur (Minahasa, Ambon dan seterusnya), sedangkan 18% lahir di luar kota Makassar tapi masih di daerah Sulawesi Selatan. Hanya 6% dari keseluruhan warga permukiman itu lahir di Jawa dan 0,5% kelahiran Cina. Dari survey yang sama juga diketahui bahwa dari seluruh penduduk 34,5% (atau 52% dari mereka yang tidak dilahirkan di Makassar) baru datang ke Makassar paling lama 5 tahun sebelumnya.<sup>22</sup> Hasil survey ini mengindikasikan setidaknya dua hal. Yang pertama adalah adanya arus migrasi yang mengalir cukup deras terutama dari daerah lain di Indonesia bagian timur dan, dalam skala yang lebih kecil, dari daerah lain di Sulawesi Selatan hingga tahun 1950, ke kota Makassar. Dari data Chabot diketahui arus migrasi mengalir sejak awal abad ke-20 tapi bertambah deras sejak tahun 1930, dan melonjak sejak tahun 1945. Yang kedua adalah, apabila diasumsikan bahwa etnisitas mereka yang tidak dilahirkan di Makassar adalah sama dengan etnisitas mayoritas masyarakat di tempat kelahirannya tersebut (artinya, yang lahir di Manado diasumsikan sebagai etnis Minahasa, misalnya), terdapat adanya keberagaman etnis yang luar biasa di Makassar di tahun 1950, dimana lebih dari sepertiga penduduk kota berasal dari daerah di Indonesia bagian timur. Belum lagi jika diperhitungkan adanya keberagaman masyarakat Makassar sebelum pendudukan Jepang.

Meskipun tidak ada data yang setepat dan sedetil yang dimiliki oleh Chabot, tetapi dapat diperkirakan migran yang datang dari tahun 1950 hingga 1960-an memiliki karakter yang berbeda dengan migran sebelumnya. Perlu diingat bahwa tahun 1950-an adalah masa memuncaknya konflik militer di pedesaan Sulawesi Selatan. Banyak daerah di luar kota yang mengalami pertumbuhan penduduk sangat rendah atau bahkan minus. Dari hasil survey yang dilakukan oleh peneliti Universitas Hasanuddin di tahun 1972 diketahui bahwa penduduk Makassar (termasuk anak dari migran gelombang pertama) yang lahir di kota ini tidak mencapai separuh dari total penduduk (tepatnya hanya 42,6%). Di masa itu lebih banyak penduduk kota yang lahir di daerah lain di Sulawesi Selatan, terutama di daerah yang berbahasa Bugis, daripada yang lahir di dalam kota. Hampir 30% penduduk kota lahir di daerah berbahasa Bugis, sedang 12,4% lahir di daerah berbahasa Makassar di luar kota. Mereka yang lahir di daerah yang berbahasa Toraja dan Mandar tidak mencapai 6% dari penduduk total kota. Demikian pula mereka yang lahir di Indonesia tapi di luar Sulawesi Selatan tidak mencapai 9%.<sup>23</sup>

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar migran dari gelombang migrasi kedua berasal dari daerah yang berbahasa Bugis. Gelombang migrasi Bugis di tahun 1950-an ini sedemikian besarnya sehingga meningkatkan proporsi kelompok etnis Bugis terhadap keseluruhan penduduk Makassar. Kalau hingga tahun 1951, atau setelah gelombang migrasi pertama, tidak sampai 18% penduduk kota dilahirkan di daerah berbahasa Bugis, maka di tahun 1972, setelah gelombang migrasi kedua, hampir 30% penduduk kota lahir di daerah berbahasa Bugis. Bukan tidak mungkin bahwa di awal tahun 1970-an mereka yang menganggap diri sebagai orang Bugis, termasuk mereka yang lahir di kota Makassar tapi adalah generasi kedua atau ketiga migran dari daerah berbahasa Bugis, merupakan mayoritas

---

<sup>22</sup> H.T. Chabot, "Enkele Resultaten van Een Onderzoek onder Verschillende Bevolkingsgroepen in de Stad Makassar (Zuid Celebes, Indonesie) gehouden in de Jaren 1951-1952" KITLV HS coll. HD 1521. Data ini juga mengoreksi temuan dalam buku *Sejarah Sosial Daerah Sulawesi Selatan* (yang menggunakan data hasil wawancara. Lihat Bab II) yang beranggapan bahwa sebagian besar penduduk permukiman-permukiman di Makassar adalah orang Makassar. Anggapan ini bisa jadi muncul karena tidak adanya sikap kritis dan hati-hati atas hasil wawancara yang sering dibentuk oleh adanya *false memory* (ingatan semu).

<sup>23</sup> M. Idrus Abustam, *Gerak Penduduk, Pembangunan dan Perubahan Sosial: Kasus Tiga Komunitas Padi Sawah di Sulawesi Selatan*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia., 1989, hal. 151

penduduk kota. Atau dengan kata lain, kota Makassar tidak bisa lagi disebut kotanya orang (berbahasa) Makassar. Dari sudut ini saja bisa dianggap sangat tepat apabila nama kota Makassar diganti dengan nama Ujung Pandang di tahun 1971. Mungkin tidak disadari pada saat itu bahwa nama baru ini dapat melepaskan konotasi etnis kota ini, sejalan dengan menurunnya proporsi penduduk berbahasa Makassar ataupun yang lahir di Makassar. Dan setelah itu seorang yang berasal dari Majenne atau yang berdarah Madura atau Cina tanpa keraguan dapat menyebut dirinya “orang Ujung Pandang,” satu hal yang tak dapat dilakukannya sebelumnya dengan sebutan “orang Makassar.” Nama “Ujung Pandang” adalah simbol ke-baru-an masyarakat kota Makassar yang sudah mulai terbentuk di awal abad ke-20.

Fasilitas kota yang dibangun untuk kapasitas tahun 1930-an jelas tidak lagi mampu menopang jumlah migran yang terus masuk dan menyebabkan peningkatan penduduk yang tajam. Kondisi ekonomi yang memburuk hingga akhir 1960-an dan kondisi politik nasional yang juga tidak menentu membuat keadaan semakin runyam. Dari hasil survey yang dilakukan oleh Institut Teknologi Bandung di tahun 1973 dapat diketahui bahwa daerah permukiman yang bangunannya “bermutu baik” hanya berada di tengah kota, sedang kondisi sebaliknya bisa ditemui di pinggiran kota seperti di sekitar Panampu, Baraya, Kalukubodoa, Maccini, dan Barabaraya. Di daerah-daerah pinggiran inilah para migran umumnya tinggal, “membangun daerah-daerah permukiman miskin dan perumahan setengah liar yang luas di sekeliling bagian pinggiran kota yang ada, mengambil alih tanah apa saja yang mereka anggap tak berpenghuni.”<sup>24</sup> Di pertengahan tahun 1960-an direncanakan pembangunan permukiman baru di sebelah timur laut kota di sekitar Panampu. Kompleks perumahan yang sangat ambisius ini direncanakan lengkap dengan lapangan olah raga, pasar dan bahkan lingkungan industri yang dicadangkan lahan seluas 130 hektar. Kompleks ini diharapkan menjadi “kota satelit” kota Makassar. Sudah jelas bahwa kompleks ini tidak dibangun untuk memfasilitasi gelombang migran baru yang umumnya miskin. Dan karena sumber dana untuk rencana ini tidak jelas, mudah ditebak tidak jelas pula nasib rencana ini.<sup>25</sup> Yang jelas, ruang kota Makassar kemudian menjadi satu medan perebutan yang menang-kalahnya tidak lagi didasarkan pada ras seperti di era kolonial, melainkan pada proses tarik menarik antara kekuatan “massa” pengungsi, penguasa militer yang datang dan pergi untuk pelbagai operasi militer, dan penguasa kota yang sekarang tak lagi di tangan penguasa kolonial.

Sejak berakhirnya NIT, kendali atas kota Makassar, setidaknya di atas kertas, berada pada para walikota yang merupakan, untuk meminjam istilah yang digunakan oleh Harvey, “anak daerah.” Kalau bubarnya NIT adalah momentum berakhirnya peranan politisi keturunan Belanda di Makassar, maka meletusnya Permesta menjadi katalis merosotnya peranan politisi non-Sulawesi Selatan di kota ini. Deklarasi Perjuangan Semesta Alam (lebih populer diingat dengan singkatannya, Permesta, mungkin karena makna nama lengkapnya agak kabur) dideklarasikan di Makassar tanggal 2 Maret 1957 di kediaman Gubernur Sulawesi yang pada masa itu dijabat oleh Andi Pangeran Petta Rani. Lima puluh satu orang sipil dan militer hadir di sana. Di antara mereka yang hadir adalah M.Yusuf Amir, Saleh Lahade, Andi Mattalatta, H.N. Vince Sumual, S.H Ngantung dan Bing Latumahina. Ny. Towoliu, ketua DPRDS kota Makassar dari Partai Kedaulatan Rakjat (PKR), adalah satu-satunya wanita yang hadir. Sikap keras Markas Besar Angkatan Darat terhadap gerakan tersebut dan perbedaan persepsi di antara tokoh-tokoh Permesta sendiri cepat menyebabkan perpecahan di dalam gerakan. Tanggal 5 Juni perpecahan tersebut membesar dan menjadi terbuka, dan pada

<sup>24</sup> McTaggart, *ibid.*, hal. 76, 96

<sup>25</sup> A. Husain, A. Muis, B. Korompis, *Kenangan 60 Tahun Kotamadya Makassar. Makassar Menuju Sosialisme.*, Makassar: Pertjetakan Sedjahtera, 1966, hal. 57-62

pertengahan Juni Sumual memindahkan markas besar Permesta ke Kinilow di Minahasa membawa serta tokoh-tokoh Permesta terutama yang berasal dari Minahasa. Perpecahan di dalam gerakan tersebut kemudian menjadi perpecahan “geografis” dimana sekarang tokoh-tokoh politik Sulawesi Selatan memegang peranan penting di Makassar, sedang tokoh-tokoh lainnya (yang sebagian besar bukan orang Sulawesi Selatan) di Minahasa.<sup>26</sup> Bisa dikatakan bahwa sejak akhir 1950-an Makassar berada sepenuhnya di tangan orang-orang Sulawesi Selatan yang sebagian besar adalah anggota militer.

Dari tahun 1952 hingga 1956 kedudukan walikota Makassar dipegang oleh Achmad Dara Sjahrudin dari partai Masjumi. Naiknya A.D. Sjahrudin ini tidak mengejutkan mengingat hasil pemilu lokal yang diselenggarakan pada tahun 1952 untuk mengisi keanggotaan DPRDS tingkat II Kota Makassar, Masjumi menduduki 7 dari 35 kursi atau 20% dari total. Sedang partai dan kelompok lain yang mampu menyaingi hanyalah PKR yang memperoleh 4 kursi atau 11,4%.<sup>27</sup> Setelah dipegang oleh M. Junus Daeng Mile dan Abd. Latief Dg. Massikki, kedudukan walikota dipegang oleh Aroepala sejak tahun 1960 hingga bulan Mei 1965.<sup>28</sup> Sejak tahun 1965 hingga tahun 1994 kedudukan walikota selalu dipegang oleh perwira angkatan darat yang dimulai oleh Major M. Dg. Patompo, Letkol. Abustam, Kol. Janci Raib, dan Kol. Soewahjo. Hanya sekali orang bukan dari Sulawesi Selatan menjabat posisi walikota Makassar yaitu Soewahjo. Soewahjo juga merupakan perwira militer terakhir yang memegang jabatan tersebut karena setelah dia, sejak 1994, kembali dua orang Sulawesi Selatan yang juga adalah birokrat karir yaitu Malik B. Masry dan Amiruddin Maula menjadi walikota.<sup>29</sup>

Dominasi politik orang Sulawesi Selatan baik atas kota Makassar maupun atas propinsi Sulawesi Selatan nampaknya sejajar dengan terus masuknya migran lokal (dari propinsi Sulawesi Selatan sendiri) ke kota Makassar. Kondisi keamanan yang terus membaik di pedesaan ternyata tidak membuat penduduk daerah tersebut lebih betah untuk tinggal di tempat kelahirannya. Laju pertumbuhan penduduk kota Makassar di masa Orde Baru berada jauh di atas laju pertumbuhan penduduk propinsi. Kalau propinsi Sulawesi Selatan selalu mengalami laju pertumbuhan yang rendah, sebaliknya kota Makassar mengalami laju yang relatif tinggi pada periode yang sama. Laju pertumbuhan sebesar 5,52% dari tahun 1971 ke tahun 1980 memang cukup dramatis, apalagi pertumbuhan penduduk propinsi hanya 1,74%.<sup>30</sup> Di dekade berikutnya, laju pertumbuhan penduduk kota mencapai 2,9% atau lebih dari dua kali laju pertumbuhan penduduk propinsi. Meski laju pertumbuhan penduduk kota menurun di dekade 1990-an, tapi angkanya masih lebih tinggi dari angka laju pertumbuhan penduduk propinsi Sulawesi Selatan. Selain itu, dengan semakin membaiknya jalan raya antar kota dan melimpahnya angkutan penumpang (*pete-pete*) antara kota Makassar dengan daerah-daerah di sekitarnya, semakin tinggi pula arus migrasi sirkuler (tidak menetap).

Bisa disimpulkan bahwa gerakan penduduk keluar dari daerah pedesaan di Sulawesi Selatan dari 1945 hingga 1970 telah menciptakan momentum yang tidak terhenti meski kondisi yang mendorong gerakan tersebut sudah berubah. Dari penelitian M. Idrus Abustam

---

<sup>26</sup> Harvey, *Pemberontakan Kahar Muzakkar.*, hal. 260-82

<sup>27</sup> “Nama Anggota DPR Makassar” ANRI Ujung Pandang, Arsip Sulawesi Selatan No. Reg. 234

<sup>28</sup> Untuk daftar walikota hingga tahun 1966 lihat A. Husain *et.al.*, *ibid.*, hal. 11

<sup>29</sup> Sebagai catatan, sejak Soediro diganti sebagai Gubernur Sulawesi di tahun 1954, tidak pernah lagi daerah Sulawesi Selatan dipimpin oleh gubernur yang tidak berasal dari daerah ini. Dan setelah Lanto Daeng Pasewang menjabat gubernur dari tahun 1954 hingga 1956, baru sekali jabatan tersebut dipegang oleh sipil yaitu oleh Achmad Amiruddin (1983-93).

<sup>30</sup> Kalau jumlah penduduk kecamatan yang ditambahkan ke Kotamadya Makassar dari kabupaten-kabupaten sebelahnya di tahun 1971 dihitung.

di pertengahan tahun 1980-an bisa dilihat bahwa dalam periode tersebut lebih banyak faktor penarik (*pull factors*) dari luar pedesaan yang menyebabkan berpindahnya penduduk keluar tempat kelahirannya. Satu hal yang jelas dari penelitiannya adalah bahwa bermigrasi membutuhkan modal. Dan karenanya mereka yang tergolong sangat miskin cenderung tidak akan bermigrasi. Sebaliknya, semakin baik ekonomi keluarga maupun ekonomi desa, semakin tinggi kecenderungan bermigrasi.<sup>31</sup> Memang dari hasil penelitian di tahun 1995 diketahui 42,8% migran yang masuk ke kota Ujung Pandang masuk karena alasan pendidikan, sedang 21,8% masuk karena alasan ikut suami/ isteri/ orang tua/ anak. Hanya 11,5% masuk ke Ujung Pandang karena alasan mencari pekerjaan.<sup>32</sup> Hasil survei ini semakin menunjukkan bahwa sebenarnya kota Ujung Pandang lebih menawarkan jasa pelayanan pendidikan daripada menawarkan kemungkinan pekerjaan.

#### D. PENUTUP

Wajah kota makassar setelah tahun 1950 kemudian berubah dengan tajam. Dengan lenyapnya teknologi kekuasaan kolonial yang membagi dan mengendalikan berbagai kelompok masyarakat kota, lenyap pula kemampuan pemerintah kota untuk membentuk wajah kota. Yang muncul dengan terbuka adalah tarik menarik antara kekuatan modal untuk mengklaim ruang kota, bersaing dengan kekuatan mobilisasi massa dan kekuatan militer. Kasus diperebutkannya lahan bekas peternakan untuk kemudian dijadikan Stadion Mattoangin adalah salah satu ilustrasi yang menunjukkan adanya perebutan oleh sekurangnya ketiga kekuatan tadi.

Kisah Makassar ini diharapkan setidaknya menunjukkan bahwa ruang kota tidak terjadi secara alamiah. Ada berbagai proses historis dan intervensi lembaga-lembaga kekuasaan yang membentuk wajah kota. Namun demikian, seperti yang nampak dalam kisah Makassar, penguasa tak selamanya mampu sepenuhnya mengendalikan dan membentuk wajah kota. Dalam berbagai kesempatan nampak bahwa mereka harus mengakomodasi kelompok yang tak dapat mereka kendalikan seperti komunitas “bumiputera” di era kolonial—meski pada saat yang sama membatasi ruang gerakannya. Bagaimana persisnya proses tarik menarik antara kekuatan-kekuatan ini adalah subyek pengamatan yang masih harus dilakukan bagi kajian sejarah perkotaan yang sangat menjanjikan ini.

---

<sup>31</sup> M. Idrus Abustam, *ibid.*, terutama bab 5.

<sup>32</sup> Thoman Pardosi, Togi Siahaan, Theodora Siagian, Indra Susilo, *Profil Migran Masuk di Enam Kota Besar. Hasil Survei Urbanisasi 1995.*, Jakarta: BPS, 1997, hal. 74